

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP
AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**Oleh:
Windi Elastuti
NIM : 156010200111064**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

RINGKASAN

Windi Elastuti, SH, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA TERBUKTI SEBAGAI ALAT PENCUCIAN UANG, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S, Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum.

Pada tesis ini peneliti ini dilatar belakangi dari masuknya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris sebagai pelapor atas transaksi yang terindikasi tindak pidana maka secara tidak langsung keduanya mempunyai peran secara langsung dalam mewujudkan negara yang damai, bersih, dan sejahtera, Selain itu secara langsung laporan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris membawa dampak baik bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris itu sendiri. Dampak baik itu pertama adalah laporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris dapat mengembalikan citra Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang selama ini terlanjur dianggap buruk oleh masyarakat. Selain itu dampak baik yang secara nyata dirasakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang digolongkan sebagai pihak yang melaporkan adalah adanya suatu jaminan hukum dari pemerintah karena dalam pasal 29 peraturan undang-undang tindakan pidana pencucian uang mengatakan bahwa pihak pelapor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata kecuali di dalamnya terdapat unsur disengaja dalam hal menyalahgunakan wewenangnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang? 2. Bagaimana perlindungan bagi notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila ternyata dikemudian hari terbukti sebagai alat pencucian uang?

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang akan mengkaji peraturan dalam suatu tata hukum yang koheren. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach* serta konsep *approach*. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. bentuk analisisnya adalah dengan menggunakan cara berfikir induktif yakni dari persoalan khusus kemudian ditarik ke umum. Dalam kasus ini tentu saja peneliti akan mengumpulkan kasus kasus yang telah terjadi.

Hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuat ternyata dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa pengganti biaya atau pemberian ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan atas perilaku melanggar hukum yang dilakukan Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris harus lebih dahulu membuktikan bahwa telah adanya kerugian yang disebabkan dari perilaku melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan

melawan hukum atau kelupaan tersebut yang disebabkan salahnya notaris yang dipertanggungjawabkan bagi Notaris yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum terhadap notaris untuk akta otentik apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Notaris, Akta Otentik, Pencucian Uang

SUMMARY

Windi Elastuti, Master Program of Notary, Faculty of Law Brawijaya University, **THE RESPONSIBILITY OF TO THE NOTARY TO THE AUTHENTIC DEED HE MADE IN THE FUTURE PROVED TO BE A MONEY LAUNDERING TOOL**, Dr. Prija Djatmika, S.H., Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum.

In this thesis this researcher background from the entry of Officer of Deed of Land and notary as reporter of transaction indicated by criminal act hence indirectly keduanyamempunyai directly in realizing state peaceful, clean, and prosperous, Besides directly report by The Land Deed Officer and notary public have a good impact on the Land Deed Officer and the notary itself. The first good impact is the report conducted by the Land Deed Authority and the notary can restore the image of the Land Deed Officer and the notary who has been considered bad by the community. In addition, the good impact that is clearly felt by the Land Deed Officer and the notary who is classified as the reporting party is the existence of a legal guarantee from the government because in article 29 of the law the act of money laundering criminal law states that the reporting party in carrying out its duties and obligations can not prosecuted in both criminal and civil cases except in which there are deliberate elements in the case of abuse of authority.

Based on this, in this study the problems formulated are 1. How is the responsibility of a notary to the deed made when in the future proven as a money laundering tool? 2. How does the notary's protection of the authentic deeds he made when proven later proved to be a money laundering tool?

This study uses the normative research type, ie research that will examine the rules in a coherent legal order. The approach used in this research is the approach statute approach and approach case approach serta konsep approach. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. the form of analysis is to use the inductive way of thinking that is from a specific problem and then drawn into the public. In this case, of course, researchers will collect cases of cases that have occurred. The results of the research in this thesis are 1. Accountability of the notary against the facts made in the future proved to be a money laundering tool is a notary must be held accountable for his actions with civil sanction in the form of replacement or gantirugi fee for those who feel aggrieved over unlawful behavior by Notary . However, before a Notary is sanctioned by civil law, the Notary must be more dulubisamebukti that there has been a loss caused by the illegal behavior of the Notary to the parties, and between the losses suffered and the unlawful act of the Notary there is a causal relationship, as well as the unlawful act or forgetfulness caused the incorrect notarial notarized for the Notary concerned. 2. Legal protection of a notary for authentic deed if in the future proved to be a money laundering tool is the existence of a Notary Public Honorary Council which is independent, in this case the existence of MKN is not a sub-part of the government that appointed it. MKN in exercising its authority to issue

a decision is not influenced by other parties or institutions, so in this case the decision produced by MKN is inviolable.

Keywords: The responsibility, Notary, Authentic Act, Money Laundering

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu tanpa adanya halangan yang berarti yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAPAKTA OTENTIK YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain untuk menuntaskan program studi yang penulis tempuh, tesis ini telah memberikan banyak manfaat kepada penulis, baik dari segi akademik maupun pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini mungkin terdapat kekurangan dalam hal materi maupun segi penulisan. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap tesis ini nantinya akan bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan.

2. dr. Wibowo dan Sri elastriah selaku ayah dan ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya.
4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S selaku pembimbing pertama telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan Tesis dan juga dalam menyelesaikan Tesis.
6. Ibu Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua, telah banyak memberikan arahan dan masukan segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
7. Sahabat ku seperjuangan Tiana Rachmawati Ningsih dan Nita Rosdiah serta teman-teman MKn kelas B yang selalu ada dan membantu dalam penyusunan Tesis ini.
8. Tak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah banyak membantu baik itu untuk laporan Tesis maupun dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Malang, 6 Oktober 2017

Penulis

Windi Elastuti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Originalitas Penelitian	6
F. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	22
A. Kajian tentang Notaris	22
1. Pengeertian Notaris	22
2. Peran Fungsi dan Wewenang Notaris.....	23
B. Kajian tentang Akta Otentik	30
1. Pengertian Akta Otentik	30
2. Jenis akta	31
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	34
C. Kajian tindak Pidana Pencucian Uang.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	41
2. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
3. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang	45
4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	47
D. Kerangka Teori.....	50
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	50
2. Teori Tanggung Jawab Notaris	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terbukti Sebagai Alat Pencucian Uang	56
1. Unsur-unsur Tindak Pencucian Uang dengan Akta Otentik.....	56
2. Tanggung Jawab Pidana Notaris.....	64
B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terbukti Sebagai Alat Pencucian Uang	79
1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris	79
2. Prosedur Penanganan Perkara Terhadap Jabatan Notaris Jika Akta yang dibuat Terbukti sebagai tindak pidana	85
 BAB IV PENUTUP	 96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
 DAFTAR PUSTAKA	

